



Kolaborasi Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat Normalisasi Kali Ciliwung

Gambir, Warta Kota

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam proyek normalisasi Kali Ciliwung pada 2023. Berkaitan dengan hal itu, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan anggaran Rp 469 miliar untuk pembebasan lahan.

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta Yusmada Faizal mengungkapkan, pemerintah daerah bertugas membebaskan tanah, sedangkan pemerintah pusat melaksanakan pekerjaan fisik. "Sesuai skema kewenangannya, Pemprov DKI Jakarta menyediakan lahan untuk normalisasi Kali Ciliwung dengan anggaran Rp 469 miliar," katanya pada Senin (28/11).

Yusmada menyatakan, lahan yang dibebaskan seluas 53.128 meter persegi di lima kelurahan, yakni Cililitan (11.191 meter persegi), Rawajati (11.552 meter persegi), Cawang (22.273 meter persegi), Tanjung Barat (7.288 meter persegi), serta Gedong 824 (meter persegi).

"Pembebasan lahan adalah langkah awal yang harus dilaksanakan, agar proses normalisasi bantaran kali dapat dikerjakan," ujarnya. Untuk memperkuat struktur bantaran kali dan menjaga lebar kali, pemerintah akan memasang dinding penahan menggunakan *sheetpile*. Bahkan, pemerintah juga membangun jalan inspeksi di sisi kanan dan kiri untuk mempermudah proyek normalisasi.

"Pekerjaan normalisasi dilaksanakan Kementerian PUPR dan untuk detail teknik perkuatan tanggul ditentukan oleh Kementerian PUPR," jelasnya.

Yusmada menambahkan, panjang Kali Ciliwung yang akan dinormalisasi pada 2023 mencapai 4,3 kilometer. Lokasi proyek ini berada di segmen Jalan Simatupang sampai Pintu Air Manggarai, dengan empat lokasi

prioritas penanganan. Pertama, Kelurahan Cililitan sepanjang 0,5 kilometer dengan pembebasan lahan 0,8 hektare. Kedua, Kelurahan Rawajati sepanjang 1 kilometer dengan pembebasan lahan 1,5 hektare. Ketiga, Kelurahan Cawang sepanjang 1,5 kilometer dengan pembebasan lahan 2,25 hektare. Keempat, Kelurahan Kampung Melayu sepanjang 1,3 kilometer dengan pembebasan lahan 1,95 hektare. "Jadi total panjang penanganan mencapai 4,3 kilometer dan kebutuhan pembebasan lahan 6,5 hektare," imbuhnya.

Yusmada menilai, kondisi Kali Ciliwung saat ini belum merata dinormalisasi. Pada bagian yang belum dinormalisasi, lebar kali bervariasi, sehingga tidak mampu menampung debit air saat curah hujan berintensitas tinggi. "Penentuan lebar ideal dan kedalaman Kali Ciliwung merupakan kewenangan Kementerian PUPR," ucapnya.

Gerebek Lumpur

Pemprov DKI Jakarta juga melakukan program Gerebek Lumpur. Pada tahun ini, sampai 18 November 2022, Dinas SDA telah mengeruk lumpur hingga 1.054.453,60 meter kubik atau 70,2 persen dari perencanaan. "Lumpur itu dikumpulkan dari 402 lokasi yang tersebar di wilayah Jakarta," tutur Yusmada.

Program Gerebek Lumpur, lanjutnya, merupakan salah satu cara penanganan prabanjir. Proyek ini dilaksanakan di lokasi rawan

genangan akibat luapan air maupun pendangkalan saluran, sehingga meningkatkan kapasitas tampung badan air.

"Untuk periode 2021, program Gerebek Lumpur dilaksanakan di 675 lokasi dan lumpur yang telah dikeruk mencapai 1.652.878,3 meter kubik, tersebar di Provinsi DKI Jakarta," ucapnya.

Tidak hanya Gerebek Lumpur, Dinas SDA juga menggiatkan pembangunan sumur resapan pada 2021. Yusmada mengemukakan, pada dasarnya pembangunan sumur resapan bertujuan untuk kegiatan konservasi air tanah. Namun, di titik-titik yang sering terjadi genangan, sumur resapan efektif untuk penanganan genangan.

Dia menambahkan, Dinas SDA pun melakukan pemeliharaan sarana atau prasarana berupa pompa stasioner (498 unit di 178 lokasi), alat berat (228 unit), dan pintu air (547 lokasi) yang tersebar di Jakarta. Termasuk pompa *mobile* 461 unit, sebagai penunjang pompa stasioner, di lokasi rawan genangan wilayah DKI Jakarta.

Sementara itu, Sekretaris Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta Dudi Gardesi memaparkan, sumur resapan berfungsi untuk konservasi air tanah dan penanggulangan genangan. Dalam

hal konservasi air tanah, air yang ditampung dalam sumur resapan diresapkan ke bawah tanah, sehingga dapat mempertahankan atau menambah cadangan air tanah. "Penambahan air tanah tersebut dapat mengurangi penurunan muka air tanah akibat

pengambilan air tanah," jelasnya.

Dalam hal penanggulangan banjir, kata Dudi, sumur resapan dapat menambah kapasitas penampungan air hujan dan mengurangi limpasan aliran permukaan, sehingga mengurangi beban saluran perkotaan. Hal

tersebut dapat optimal dengan kondisi intensitas hujan rendah-sedang dan limpasan yang bersifat lokal, bukan merupakan kiriman dari limpasan permukaan lokasi lain.

"Jadi, sumur resapan adalah upaya konservasi air tanah untuk mempertahankan cadangan air tanah, sehingga mencegah terjadinya *land subsidence* (penurunan muka tanah), sekaligus merupakan bagian dari keseluruhan upaya peningkatan infrastruktur penanganan genangan di Jakarta," pungkasnya. (faf)